



UNESA
Universitas Negeri Surabaya

UNESA EMAS BERMARTABAT



UNESA EMAS

BERMARTABAT



50 TAHUN

1964 - 2014

EDITOR
Much. Khoiri
Luthfiyah Nurlaela

Dalam perkembangan lebih lanjut untuk mematangkan kedewasaannya, Unesa harus teguh dalam menjaga jati dirinya di segala aspek kehidupan. Kedewasaan akademik dan akademisi, dibarengi pembinaan karakter yang mantap serta ditunjang oleh makin tercukupinya sarana dan prasarana yang memadai, dapat menjadikan Unesa sebagai PT yang bermartabat.

Aisyah Endah Palupi dan Sunarto

Unesa ke depan adalah mata air. Sebagai sebuah mata air, Unesa dapat memancarkan kejernihan air yang sehat dan menyegarkan bagi siapapun yang memanfaatkan. Sungai tidak akan terbentuk tanpa diawali oleh sebuah mata air. Air yang mengalir tidak akan bergelora jika tidak ditambah oleh air baru yang bermunculan dari mata air. Unesa adalah mata air Indonesia sebagai negara bangsa yang multidimensi ini. Itulah syarat dari sebuah kampus yang bermartabat.

Djuli Djatiprambudi

Unesa sedang dan terus bersolek dengan segala pemik-pemiknya untuk tampil lebih memikat dan lebih "seksi". Namun, kecantikan fisik saja tidak cukup. Unesa juga perlu menata diri bagian dalam untuk membuat warganya terutama mahasiswa lebih percaya diri, lebih tegap jalannya, dan mantap langkahnya melalui kepuasan layanan yang diberikan oleh almamater tercintanya. Dengan strategi demikian, pembangunan Unesa akan lebih bermakna.

Slamet Setiawan

Unesa sebagai salah satu LPTK sudah seharusnya memiliki kepedulian bagi percepatan pembangunan di daerah 3T, khususnya pembangunan dalam bidang pendidikan. LPTK, khususnya Unesa, memiliki pengalaman panjang dalam program tersebut, dan sampai saat ini pun, program-program yang berpihak pada daerah 3T masih terus dilaksanakan. Ke depan diharapkan, Unesa memiliki inisiatif mandiri untuk merancang program-program serupa.

Luthfiyah Nurlaela



Universitas Negeri Surabaya
UNIVERSITY PRESS

Kampus Unesa Ketintang Surabaya Gedung C-15
T. 031-8288598; 8280009 ext. 109
F. 031-8293426
E. press@unesa.ac.id

ISBN 978-979-028-665-8



978-979-028-665-8

UNESA EMAS BERMARTABAT

Penulis:

Aisyah Endah Palupi, Sunarto, dkk

Editor:

Much. Khoiri dan Luthfiyah Nurlaela

Ilustrator Cover:

Arohman

Desain dan Kompugrafi:

@arohmanmail

Copyright © 2014

Diterbitkan oleh:

UNIVERSITY PRESS

Kampus Unesa Ketintang Surabaya Gedung C-15

T. 031-8288598; 8280009 ext. 109

F. 031-8293426

E. press@unesa.ac.id

Cetakan I, Oktober 2014

xv + 284 hlm; 14,8 x 21 cm

ISBN 978 - 979 - 028 - 665 - 8

Kata Pengantar

PADA tanggal 19 Desember 2014 Universitas Negeri Surabaya memperingati ulang tahun yang ke-50. Ini berarti Unesa telah mencapai usia 50 tahun, suatu usia yang cukup matang dan tentu sudah banyak yang dilakukan selama kurun waktu tersebut. Dari segi waktu, Unesa telah mengalami perubahan status, mulai dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP), sampai kemudian berubah menjadi Universitas Negeri Surabaya, pada tahun 1999. Hampir selama 35 tahun Unesa mengabdikan diri untuk mendidik calon-calon pendidik. Tentu sudah banyak pendidik (guru) yang dilahirkann dari "ibu pertiwi" Unesa. Menurut Prof. Muclas Samani, hampir 30 persen guru di Jawa Timur adalah alumni Unesa. Dan tentu alumni unesa bukan hanya menjadi guru (mengajar) di Jawa Timur, tetapi banyak juga yang mengajar di daerah lain. Dan saya yakin, bahwa ada juga alumni Unesa, yang bekerja dan berhasil di bidang lain. Ini semua menunjukkan bahwa Unesa telah melakukan banyak hal untuk kepentingan bangsa dan Negara.

Unesa dan Pendidikan di Daerah Tertinggal

Luthfiyah Nurlaela

Pendahuluan

PENGALAMAN melakukan perjalanan ke berbagai daerah tertinggal membuat kesadaran dan keprihatinan saya pada pendidikan semakin mendalam. Tidak perlu jauh-jauh ke daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) seperti di NTT, Papua, Maluku dan sebagainya. Di Jawa Timur saja, masih ada—kalau tidak boleh dikatakan banyak—sekolah yang kondisinya sangat mengenaskan, baik dilihat dari kondisi fisik maupun sumber daya manusianya.

Dalam kapasitas saya sebagai Pembina Himpunan Mahasiswa Pecinta Alam (Himapala) dan juga sebagai koordinator Program Sarjana Mendidik di Daerah 3T (SM-3T), serta koordinator Program Jatim Mengajar, saya 'terpaksa' harus sering melakukan blusukan ke daerah-daerah tertinggal. Istilah terpaksa, sebenarnya sangat kurang tepat. Pada dasarnya, saya menyukai aktivitas sosial dengan bumbu petualangan. Melaksanakan tugas-

tugas seperti itu, seperti memenuhi panggilan hati saja.

Himapala memiliki program kerja rutin tahunan yang salah satunya adalah Pekan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM). Program ini mengambil daerah sasaran desa terpencil di Jawa Timur, di mana di desa tersebut biasanya terdapat sekolah tertinggal, masyarakat yang pada umumnya miskin, infrastruktur yang memprihatinkan, dan daya dukung lain yang rendah. Selama sepekan, anak-anak Himapala akan melakukan berbagai aktivitas baik dalam bentuk pembangunan fisik (misalnya membangun MCK, merenovasi musala, membuat papan-papan nama untuk kantor desa atau petunjuk arah jalan, dan lain-lain), membantu proses pembelajaran di sekolah dan di TPA (Taman Pendidikan Al-Quran), memberi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, memberi pelatihan beberapa keterampilan bagi karang taruna dan PKK desa, dan juga aktivitas ringan seperti memutar film-film dokumenter (semacam *Laskar Pelangi* dan *Garuda di Dadaku*, atau film-film kartun yang menghibur sekaligus mendidik).

Saya biasanya akan menyempatkan diri mengunjungi mereka. Menempuh berjam-jam rute dengan melintasi jalan berbatu-batu atau jalan dari tanah yang dikeraskan, menembus hutan, dan menemukan mereka berada di sebuah tempat yang sangat terpencil, di tengah-tengah masyarakat yang masih sangat tradisional. Ya, meski di

Jawa, tepatnya di Jawa Timur—yang konon merupakan barometer nasional untuk keberhasilan pembangunan hampir di segala bidang—tidak terlalu sulit mendapatkan rute yang sensasinya serasa di daerah 3T yang jauh di luar Jawa sana.

Saya akan melihat proses dan hasil kerja anak-anak muda itu, berinteraksi dengan masyarakat setempat, menengok sekolah, musala, dan mencoba menggali berbagai hal terkait dengan kondisi dan potensi siswa, guru, orang tua, dan masyarakat pada umumnya. Di antara berbagai keterbatasan infrastruktur, sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia, pendidikan menjadi fokus perhatian saya. Jumlah dan mutu guru, fasilitas sekolah, rendahnya semangat belajar siswa, minimnya figur panutan karena tipisnya komitmen kepala sekolah, minimnya dukungan orang tua dan masyarakat, adalah hal-hal yang umumnya menjadi faktor penyebab rendahnya mutu pendidikan di daerah tertinggal.

Menurut data dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT), di seluruh Indonesia, ada sebanyak 183 daerah tertinggal, 5 di antaranya ada di Jawa Timur. Lima kabupaten di Jawa Timur tersebut adalah Bondowoso, Situbondo, Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan. Namun di luar kabupaten tersebut, banyak sekali desa tertinggal, termasuk di Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Lamongan dan

kabupaten lain, yang sebenarnya dari letak geografisnya relatif dekat dengan ibukota provinsi (Surabaya). Apa lagi di kabupaten-kabupaten lain seperti Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Bojonegoro, Tuban, Banyuwangi, Jember, dan seterusnya, keberadaan desa tertinggal tersebut hampir tak terhitung jumlahnya.

Program Jatim Mengajar, yang merupakan program kerja sama antara Unesa dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF), merupakan program yang mengirimkan sarjana pendidikan ke daerah tertinggal di Jawa Timur. Meskipun menurut data hanya ada 5 kabupaten tertinggal di Jawa Timur, berdasarkan informasi yang langsung diperoleh dari beberapa Kepala Dinas Pendidikan di kabupaten di Jawa Timur, banyak sekolah yang masih sangat kekurangan guru dan terbatas sekali sarana dan prasarananya. Di Kabupaten Ponorogo, misalnya, dari 20 kecamatan, setidaknya ada 5 kecamatan tergolong sebagai kecamatan terpencil. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Pudak, Sooko, Sawoo, Ngrayun, dan Ngebel. Di setiap kecamatan tersebut, ada sejumlah sekolah yang kondisinya sangat memprihatinkan, baik dilihat dari sarana dan prasarananya, maupun dari jumlah dan mutu gurunya.

Kabupaten yang lain, misalnya Madiun, dari 15 kecamatan, setidaknya ada 4 kecamatan yang di dalamnya

terdapat beberapa sekolah yang kondisinya masih sangat memerlukan perhatian. Empat kecamatan tersebut adalah Kecamatan Saradan, Gemarang, Dagangan, dan Kare. Sementara di Lamongan, dari 27 kecamatan, beberapa sekolah tertinggal tersebar di Kecamatan Sambeng, Solokuro, Maduran, Kembangbahu, Paciran, Sugio, Brondong, Modo, Kedungpring, Ngimbang, Sukorame, Bluluk dan Laren.

Tentu saja, masih ada banyak sekolah tertinggal di kabupaten yang lain. Jawa Timur yang terdiri dari 38 kabupaten/kota tersebut, bahkan di kabupaten yang berdekatan dengan ibukota provinsi pun (Sidoarjo dan Gresik), masih ditemukan beberapa sekolah yang berada di daerah pinggiran, yang kondisinya sangat memprihatinkan. Tidak hanya kondisi sarana dan prasarana serta guru dan siswanya, namun juga sulitnya medan yang musti ditempuh untuk mencapai sekolah-sekolah tersebut.

Tidak berbeda jauh dengan apa yang terjadi di daerah 3T, misalnya seperti di Sumba Timur, Talaud, Maluku Barat Daya, Aceh Singkil, Mamberamo Tengah dan Mamberamo Raya. Keenam kabupaten tersebut merupakan wilayah binaan Unesa dalam Program SM-3T tahun 2013. Selain faktor-faktor sebagaimana yang sudah disebut sebelumnya, faktor kendala budaya dan peradaban

juga menjadi penyebab rendahnya mutu pendidikan. Juga adat dan kebiasaan tradisional yang masih sangat kental. Faktor kondisi geografis yang menyebabkan sulitnya medan yang harus ditempuh untuk mencapai sekolah, tentu saja jauh lebih parah dibanding dengan wilayah-wilayah tertinggal di Jawa Timur, atau di Jawa pada umumnya.

Daerah Tertinggal

Apa pengertian daerah tertinggal? Secara resmi pengertian daerah tertinggal muncul dalam dokumen Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (sesuai Permen PDT No. 07/PER/M-PDT/III/2007). Daerah tertinggal diartikan sebagai daerah kabupaten yang masyarakat dan wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain di Indonesia. Malik (2013) juga mendefinisikan daerah tertinggal sebagai daerah kabupaten yang masyarakat dan wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional

Suatu daerah dikategorikan sebagai daerah tertinggal karena beberapa faktor penyebab antara lain: 1) geografis, secara geografis daerah tertinggal relatif sulit dijangkau karena letaknya yang jauh di pedalaman, perbukitan/pegunungan, kepulauan, pesisir, dan pulau-pulau

terpencil atau karena faktor geomorfologis lainnya sehingga sulit dijangkau oleh jaringan baik transportasi maupun media komunikasi; 2) sumberdaya alam, beberapa daerah tertinggal tidak memiliki potensi sumberdaya alam, atau daerah yang memiliki sumberdaya alam yang besar namun lingkungan sekitarnya merupakan daerah yang dilindungi atau tidak dapat dieksploitasi, dan daerah tertinggal akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan; 3) sumberdaya manusia, pada umumnya masyarakat di daerah tertinggal mempunyai tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang relatif rendah serta kelembagaan adat yang belum berkembang; 4) prasarana dan sarana, keterbatasan prasarana dan sarana komunikasi, transportasi, air bersih, irigasi, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan lainnya yang menyebabkan masyarakat di daerah tertinggal tersebut mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial; dan 5) daerah terisolasi, rawan konflik dan rawan bencana, daerah tertinggal secara fisik lokasinya amat terisolasi, disamping itu seringkali suatu daerah mengalami konflik sosial, bencana alam seperti gempa bumi, kekeringan dan banjir, dan dapat menyebabkan terganggunya kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi.

Penentuan kriteria daerah tertinggal dilakukan dengan menggunakan pendekatan relatif berdasarkan

pada perhitungan enam kriteria dasar dan 27 indikator utama, meliputi: 1) *perekonomian masyarakat*, dengan indikator utama persentase keluarga miskin dan konsumsi perkapita; 2) *sumber daya manusia*, dengan indikator utama angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf; 3) *prasarana (infrastruktur)* dengan indikator utama jumlah jalan dengan permukaan terluas aspal/beton, jalan diperkeras, jalan tanah, dan jalan lainnya, persentase pengguna listrik, telepon dan air bersih, jumlah desa dengan pasar tanpa bangunan permanen, jumlah prasarana kesehatan/1000 penduduk, jumlah dokter/1000 penduduk, jumlah SD-SMP/1000 penduduk; 4) *kemampuan keuangan daerah* dengan indikator utama celah fiskal; 5) *aksesibilitas* dengan indikator utama rata-rata jarak dari desa ke kota kabupaten, jarak ke pelayanan pendidikan, jumlah desa dengan akses pelayanan kesehatan lebih besar dari 5 km; dan 6) *karakteristik daerah* dengan indikator utama persentase desa rawan gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan bencana lainnya, persentase desa di kawasan lindung, desa berlahan kritis, dan desa rawan konflik satu tahun terakhir.

Dengan kriteria itulah akhirnya ditetapkan 183 kabupaten yang dikategorikan sebagai Daerah Tertinggal (DT) di Indonesia. Penyebarannya mulai dari Nangro Aceh Darussalam/NAD (12 DT), Sumatera Utara (6 DT),

Sumatera Barat (8 DT), Sumatera Selatan (7 DT), Bengkulu (6 DT), Lampung (4 DT), Bangka Belitung (1 DT), Kepulauan Riau (2 DT), Jawa Barat (2 DT), Jawa Timur (5 DT), Banten (2 DT), NTB (8 DT), NTT (20 DT), Kalimantan Barat (10 DT), Kalimantan Tengah (1 DT), Kalimantan Selatan (2 DT), Kalimantan Timur (3 DT), Sulawesi Utara (3 DT), Sulawesi Tengah (10 DT), Sulawesi Selatan (4 DT), Sulawesi Tenggara (9 DT), Gorontalo (3 DT), Sulawesi Barat (5 DT), Maluku (8 DT), Maluku Utara (7 DT), Papua Barat (8 DT), dan Papua (27 DT). Berdasarkan data, penyebaran daerah tertinggal sebagian besar (70%) terdapat di kawasan Timur Indonesia.

Peran Strategis Daerah Tertinggal

Daerah tertinggal, terutama yang berada di daerah perbatasan (terdepan atau terluar), memiliki peran yang sangat strategis dalam memperkuat ketahanan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena berdasarkan pulau inilah batas negara kita ditentukan. Daerah yang umumnya berupa pulau atau daratan terluar ini biasanya adalah daerah terpencil, bahkan tidak berpenduduk. Kalau pun ada penduduknya, anggota masyarakat tersebut tergolong miskin, jauh dari sejahtera dan sangat tertinggal. Masih belum banyak tersentuh oleh program pembangunan sehingga akses

terhadap prioritas pembangunan seperti infratraktur, pemberdayaan potensi, pelayanan sosial, ekonomi, dan pendidikan masih sangat terbatas.

Indonesia memiliki perbatasan maritim dengan Australia, Timor Leste, Papua Nugini, Palau, Filipina, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, dan India. Pulau-pulau ini seharusnya mendapatkan perhatian dan pengawasan serius agar tidak menimbulkan permasalahan yang dapat mengganggu keutuhan wilayah Indonesia, khususnya pulau yang terletak di wilayah perbatasan dengan negara-negara yang tidak/belum memiliki perjanjian (*agreement*) dengan Indonesia.

Ada beberapa kondisi yang membahayakan keutuhan wilayah jika terjadi pada pulau-pulau terluar, di antaranya : 1) hilangnya pulau secara fisik akibat abrasi, tenggelam, atau karena kesengajaan manusia; 2) hilangnya pulau secara kepemilikan, karena perubahan status kepemilikan akibat pemaksaan militer atau sebagai sebuah ketaatan pada keputusan hukum seperti yang terjadi pada kasus berpindahnya status kepemilikan Sipadan dan Ligitan dari Indonesia ke Malaysia; dan 3) hilang secara sosial dan ekonomi, akibat praktek ekonomi dan sosial dari masyarakat di pulau tersebut. Misalnya pulau yang secara turun-temurun didiami oleh masyarakat dari negara lain.

Pulau-pulau terluar juga sangat rentan dengan sapaan

dan kasih sayang dari negara tetangga. Kemiskinan dan ketertinggalan masyarakatnya menyebabkan mudahnya mereka mempertaruhkan rasa nasionalisme demi sebuah kesejahteraan yang lebih menjanjikan. Sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur (NTT), misalnya, memperoleh bantuan pembangunan gedung-gedung sekolah dan rumah tinggal untuk daerah pesisir. Sejumlah orang asing juga sudah sempat bertempat tinggal di sebuah pulauanya dengan leluasa. Sekelompok masyarakat di pulau terluar itu, harus berteriak dan mengancam akan melepas kewarganegaraannya dari NKRI, dan berpindah bergabung dengan negara tetangga, hanya demi memperoleh sebuah sekolah dan layanan kesehatan.

Pengawasan dari pemerintah Indonesia yang longgar di daerah-daerah perbatasan juga membuka peluang masuknya penyusup, baik lewat perairan maupun lewat darat. Sebagaimana diketahui, wilayah laut Indonesia mencapai 5.877.879 kilometer persegi. Perairan Indonesia kaya dengan ikan, dan menjadi alasan bagi ribuan kapal *illegal fishing* bebas berlalu-lalang untuk mengeruk ikan, apa lagi tanpa halangan yang berarti dari kapal patroli.

Kondisi pendidikan di daerah tertinggal juga sangat memprihatinkan. Berbagai masalah pendidikan, seperti kekurangan guru baik dari segi jumlah mau pun mutunya, terbatasnya sarana-prasarana, minimnya daya dukung

pemerintah, dan kendala budaya masyarakat yang pada umumnya masih terbelakang dan sulit menerima perubahan, menjadi persoalan yang perlu waktu puluhan tahun untuk menguraikannya. Berbagai laporan dari para peserta SM-3T menggambarkan betapa sulitnya membangkitkan kesadaran masyarakat, membangun kecintaan pada belajar dan pendidikan, sebagai hal-hal yang sama pentingnya dengan berkebun, mencari kayu di hutan, menggembala, dan kegiatan produktif yang lain.

Daerah tertinggal, terutama yang terluar, memiliki peran yang strategis sebagai sabuk pengaman NKRI. Oleh sebab itu, selakanya daerah-daerah tersebut mendapatkan perhatian yang lebih proporsional dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, agar masyarakat setempat lebih sejahtera, dan tidak terkikis rasa nasionalismenya. Bagaimana pun, tidak bisa dipungkiri, ketika sebuah komunitas merasa tidak atau kurang diperhatikan, maka perhatian dari pihak lain, apa lagi bila dibarengi dengan iming-iming kehidupan yang lebih mensejahterakan, sangat mungkin membuka peluang terjadinya hilangnya rasa cinta Tanah Air. Oleh sebab itu, memberi perhatian pada pembangunan di daerah tertinggal, dalam semua bidang, harus menjadi prioritas program nasional.

Program Pembangunan untuk Daerah Tertinggal

Pembangunan untuk daerah tertinggal merupakan sebuah upaya terencana untuk mengubah suatu wilayah yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang memiliki berbagai permasalahan, baik sosial, ekonomi, maupun keterbatasan fisik, menjadi daerah yang maju dengan masyarakat yang memiliki kualitas hidup yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya. Pembangunan untuk daerah tertinggal tidak hanya meliputi pembangunan ekonomi, namun juga sosial, budaya, dan keamanan. Selain itu, aspek kesejahteraan hidup masyarakat juga memerlukan perhatian dan keberpihakan dari semua pihak.

Ada beberapa program pembangunan di daerah tertinggal yang sudah pernah dilakukan oleh beberapa kabupaten dan dinilai membawa hasil bagi peningkatan kualitas SDM dan aspek lainnya. Beberapa kegiatan tersebut antara lain: 1) Pemberdayaan ekonomi lokal (*local economic development priority*), 2) Pemberdayaan masyarakat dan komunitas lokal, 3) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, 4) Peningkatan akses dan alokasi daerah, 5) Kustomisasi dan kreatif berdasar karakteristik.

Pada program pemberdayaan ekonomi lokal, prioritas pembangunannya diarahkan untuk mengem-

bangkan ekonomi daerah tertinggal didasarkan pada pendayagunaan potensi sumberdaya lokal (sumberdaya manusia, sumberdaya kelembagaan, serta sumberdaya fisik) yang dimiliki masing-masing daerah. Fokus percepatan pengembangan ekonomi lokal adalah: kemampuan dan keterampilan masyarakat, modal sosial yang ada dalam masyarakat, tumbuhnya pusat kegiatan ekonomi baru, dengan memperhatikan produk andalan daerah; Akses masyarakat dan usaha mikro, kecil, dan menengah kepada permodalan, pasar, informasi, dan teknologi; Keterkaitan kegiatan ekonomi di daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan; Kerjasama dan keterkaitan kegiatan ekonomi antar daerah dalam kegiatan ekonomi lokal; dan penguatan dan penataan kelembagaan pemerintahan daerah dan masyarakat.

Pada program pemberdayaan masyarakat dan komunitas lokal, meliputi pemberdayaan masyarakat pada pengembangankemampuanataukapasitasdankapabilitas, dan pengembangan peluang dan pengelolaan modal sosial lokal. Program ini difokuskan pada: Pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat; Kemampuan dan keterampilan masyarakat; Pengelompokan permukiman untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyediaan pelayanan umum, khususnya untuk komunitas adat terpencil; dan kepastian hukum hak atas tanah kepada

masyarakat melalui penegakan hukum pertanahan yang adil dan transparan secara konsisten yang kesemuanya digerakkan untuk pengembangan ekonomi lokal.

Selanjutnya, program peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia, dimaksudkan untuk memberikan dukungan strategi pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan prasarana dan sarana. Dengan kata lain, program tersebut untuk mendukung kedua program sebelumnya dan program-program yang lain. Pengelolaan program mutlak memerlukan kelembagaan dan sumberdaya yang memadai agar tujuan program dapat tercapai sesuai harapan.

Peningkatan akses dan alokasi daerah, merupakan program yang prioritasnya diarahkan untuk membuka keterisolasian daerah tertinggal. Melalui program ini, daerah tertinggal diharapkan memiliki keterkaitan dengan daerah maju, meningkatkan mobilisasi masyarakat, modal, dan faktor-faktor produksi lainnya guna menunjang pengembangan ekonomi lokal.

Selanjutnya adalah program kustomisasi dan kreatif berdasar karakteristik. Prioritas program ini diarahkan untuk menjadikan daerah perbatasan sebagai beranda depan negara dengan mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kapasitas daerah

perbatasan sebagai koridor peningkatan ekspor dan perolehan devisa, menyusun rencana strategis pengembangan wilayah perbatasan, dan mengembangkan wawasan kebangsaan masyarakat.

Unesa Peduli Daerah Tertinggal

Sebagai salah satu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), Unesa telah terlibat di berbagai program dalam rangka membantu percepatan pembangunan pendidikan di daerah tertinggal dan 3T. Berbagai program tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk terus menyelenggarakan program yang sama, namun tidak harus menunggu penunjukan atau penugasan pemerintah (Kemendikbud), sebagaimana program-program yang selama ini dilaksanakan.

Beberapa program yang saat ini sedang dilaksanakan oleh LPTK sebagai program *piloting* dari Dikti adalah program-program dalam payung MBMI (Maju Bersama Mencerdaskan Indonesia). Beberapa program tersebut meliputi: PPG Terintegrasi (PPGT), PPG Kolaboratif, SM-3T, PPG Pasca SM-3T. Program-program yang lain, baik di bawah Dikti dan direktorat yang lain dalam lingkup Kemendikbud, sebagai program kerja sama dengan pihak lain, di antaranya program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) dan Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM).

1. PPGT

Program PPGT merupakan program pendidikan profesi guru yang diselenggarakan dalam kurun waktu yang bersamaan baik program akademik substansi bidang studi maupun akademik kependidikan dan dilanjutkan dengan praktik pengalaman lapangan (PPL) yang intensif di sekolah mitra serta diakhiri uji kompetensi dengan memiliki kewenangan tambahan (*multigrade/multisubject*). Kewenangan tambahan adalah kewenangan yang diberikan setelah kewenangan utama dalam melaksanakan tugas sebagai guru. Kewenangan utama guru SD adalah sebagai guru kelas dengan kewenangan tambahan sebagai guru SMP pada salah satu dari lima (5) mata pelajaran pokok di SD (Bahasa Indonesia, PKn, Matematika, IPA, IPS). Kewenangan tambahan bagi guru SMK adalah kewenangan utama sebagai guru pada salah satu mata pelajaran produktif dengan kewenangan tambahan sebagai guru pada salah satu mata pelajaran adaptif yang relevan.

Daerah tertinggal adalah daerah-daerah yang dengan pencapaian pembangunan yang rendah, memiliki indeks kemajuan pembangunan ekonomi dan SDM di bawah rata-rata indeks nasional (RPJM 2010-2014). Daerah terdepan adalah wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Daerah terluar adalah wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan laut lepas.

Sejalan dengan kondisi di daerah 3T dan didukung pengalaman LPTK menyelenggarakan pendidikan guru secara terintegrasi, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menyelenggarakan Rintisan Program PPGT. Rintisan Program PPGT bertujuan menghasilkan model pendidikan guru untuk melahirkan calon guru yang memiliki keunggulan dalam kompetensi sebagai guru profesional dengan kewenangan tambahan.

2. PPG Kolaboratif

Beberapa LPTK pernah memiliki pengalaman menjalin kerjasama dengan beberapa instansi penyelenggara pendidikan yang menyiapkan tenaga ahli dibidang tertentu untuk bersama-sama menyelenggarakan program Akta Mengajar III dan IV bagi lulusan yang berlatar non kependidikan, terutama bagi guru yang sudah mengajar tetapi tidak memiliki akta mengajar. Sebagaimana diketahui Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) yang sekarang menjadi Badan Kepegawaian Negara (BKN) tidak memberikan tunjangan fungsional guru bagi mereka yang tidak memiliki sertifikat akta mengajar. Bidang-bidang yang pernah dilakukan kerja

sama antara lain untuk guru pertanian (Kerjasama dengan Institut Pertanian Bogor), instruktur Lembaga Pendidikan PT Garuda, Tenaga Pendidikan dilingkungan POLRI, Pengajar pada Departemen Perhubungan Laut, Pengajar pada Sekolah Tinggi Transportasi Darat, Guru Sekolah Menengah Analis Kimia, Guru Sekolah Perawat (Departemen Kesehatan), dan calon instruktur pada Komando Pendidikan Angkatan Laut. Kerangka kerjasama tersebut dapat menjadi pengalaman melalui beberapa modifikasi yang sesuai dengan keperluan.

Disamping penyelenggaraan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang konsekutif (setelah S1) dicoba untuk dikembangkan kembali program profesi guru yang terintegrasi dan kolaboratif sebagai rintisan. Program Pendidikan Profesi Guru terintegrasi adalah pendidikan profesi guru yang diselenggarakan dalam kurun waktu yang bersamaan dalam program akademik baik substansi bidang studi maupun substansi bidang kependidikan dan diakhiri dengan PPL yang intensif di sekolah yang relevan. Kolaboratif adalah LPTK melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi/politeknik yang memiliki sumber daya relevan dengan program studi keahlian yang diperlukan dan belum dimiliki oleh LPTK.

Rintisan Program Kolaboratif PPG SMK Produktif bertujuan menghasilkan model pendidikan guru untuk

melahirkan calon guru yang memiliki keunggulan dalam kompetensi sebagai guru profesional di bidang kejuruan.

3. SM-3T

Program SM-3T sebagai salah satu Program Maju Bersama Mencerdaskan Indonesia ditujukan kepada para Sarjana Pendidikan yang belum bertugas sebagai guru, baik sebagai pegawai negeri sipil (PNS) maupun guru tetap yayasan (GTY), untuk ditugaskan selama satu tahun di daerah 3T. Program SM-3T dimaksudkan untuk membantu mengatasi kekurangan guru, sekaligus mempersiapkan calon guru profesional yang tangguh, mandiri, dan memiliki sikap peduli terhadap sesama, serta memiliki jiwa pendidik untuk mencerdaskan anak bangsa, agar dapat maju bersama mencapai cita-cita luhur seperti yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa Indonesia.

Tujuan Program SM-3T meliputi: 1) Membantu daerah 3T dalam mengatasi permasalahan pendidikan terutama kekurangan tenaga pendidik; 2) Memberikan pengalaman pengabdian kepada sarjana pendidikan sehingga terbentuk sikap profesional, cinta tanah air, bela negara, peduli, empati, terampil memecahkan masalah kependidikan, dan bertanggung jawab terhadap kemajuan bangsa, serta memiliki jiwa ketahananmalangan dalam mengembangkan pendidikan pada daerah-daerah

yang tergolong 3T; 3) Menyiapkan calon pendidik yang memiliki jiwa keterpanggilan untuk mengabdikan dirinya sebagai pendidik profesional pada daerah 3T; dan 4) Mempersiapkan calon pendidik profesional sebelum mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Selanjutnya, ruang lingkup SM-3T mengikuti: 1) Melaksanakan tugas pembelajaran pada satuan pendidikan sesuai dengan bidang keahlian dan tuntutan kondisi setempat; 2) Mendorong kegiatan inovasi pembelajaran di sekolah; 3) Melakukan kegiatan ekstrakurikuler; 4) Membantu tugas-tugas yang terkait dengan manajemen pendidikan di sekolah; dan 5) Melakukan tugas sosial dan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung program pembangunan pendidikan dan kebudayaan di daerah 3T.

4. PPG SM-3T

Program SM-3T diperuntukkan bagi para Sarjana Pendidikan, yang belum bertugas sebagai guru PNS/ Guru Tetap Yayasan, untuk ditugaskan selama satu tahun di daerah 3T. Program SM-3T dirancang untuk membantu penyelesaian masalah kekurangan guru, dan secara bersamaan untuk mempersiapkan calon guru profesional yang tangguh, mandiri, memiliki sikap peduli sesama, dan memiliki jiwa besar mencerdaskan anak bangsa, agar dapat maju bersama mencapai cita-cita luhur seperti yang

diamanatkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Setelah menyelesaikan masa penugasan 1 (satu) tahun di daerah 3T tersebut, peserta memperoleh kesempatan untuk mengikuti program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan selama 1 (satu) tahun, yang selanjutnya disebut dengan PPG SM-3T.

Program PPG SM-3T merupakan Program Pendidikan Profesi Guru bagi sarjana pendidikan yang telah melaksanakan tugas pengabdian di daerah 3T selama satu tahun.

5. ADik

Program lain adalah program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik), yang merupakan kerjasama antara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B). Program ini khusus untuk ratusan calon mahasiswa putra-putri asli Papua dan Papua Barat. Para peserta program afirmasi ini dapat mengenyam pendidikan di 40 program studi. Maksud program ini utamanya adalah menumbuhkan rasa kebangsaan dan keberpihakan pengembangan sumber daya manusia bagi masyarakat Papua dan Papua Barat.

Tahun 2014 ini program afirmasi pendidikan tinggi (ADik) untuk daerah Papua telah memasuki tahun ke

tiga. Sejak 2012 program ADik telah memberi kesempatan kepada lebih dari 1.000 mahasiswa dari tanah Papua untuk melanjutkan pendidikan tinggi di 39 perguruan tinggi negeri terbaik. Dan di tahun ini Kemdikbud menyiapkan kuota 500 calon mahasiswa untuk mengikuti program tersebut.

Tujuan program ADik adalah untuk menyiapkan sumber daya manusia putra-putri asli Papua-Papua Barat yang berkualitas untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional. Upaya Kemdikbud untuk melakukan percepatan pendidikan di tanah Papua sudah seharusnya didukung oleh kerja sama dan komunikasi yang baik antara Kemdikbud dengan pemerintah daerah Papua dan Papua Barat. Komunikasi tersebut meliputi koordinasi dari seleksi sampai mahasiswa tersebut kembali ke Papua, hingga pembagian penganggaran.

6. ADEM

Program afirmasi yang lain adalah Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM). Program ini bagi siswa SMP Papua dan Papua Barat. Peserta program akan bersekolah di Jawa dan Bali paling tidak selama tujuh tahun atau sampai sarjana. Setelah itu mereka akan kembali ke daerah asal untuk menjadi agen perubahan.

Siswa siswi asal Papua dan Papua Barat tersebut tersebar di 179 SMA/SMK unggulan baik negeri maupun

swasta di sejumlah kota di Pulau Jawa, yakni Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat di Bogor dan Bandung, DI Yogyakarta, Jawa Tengah di Semarang, Demak, Magelang, Wonogiri, Klaten, Provinsi Jawa Timur di Malang, Jember, Lamongan, dan Tuban serta Provinsi Bali di Kuta, Buleleng dan Karang Asem.

Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Papua dan Papua Barat merupakan program pemerintah untuk mempercepat pembangunan di wilayah Indonesia bagian Timur khususnya Papua dan Papua Barat. Jalur afirmasi bukanlah bentuk diskriminasi atas Papua. Namun, lebih kepada transformasi kultur akademis kepada masyarakat Papua melalui status otonomi khusus yang dimilikinya. Program afirmasi ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara Jawa dan Papua. Program ini juga bertujuan untuk mencegah para mahasiswa afirmasi pendidikan mengalami gegar budaya ketika kuliah di perguruan tinggi negeri di Jawa.

Program ADEM bidang pendidikan dilaksanakan oleh Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) Ditjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) serta dinas pendidikan provinsi dalam bentuk pemberian kuota dan bantuan pendidikan (biaya hidup dan sekolah) bagi siswa-siswi

lulusan SMP/MTs guna melanjutkan pendidikan pada jenjang SMA/SMK di luar Papua. Program ADEM dilaksanakan untuk pertama kali pada tahun 2013 dengan harapan pada tahun 2016 tersedia siswa-siswi lulusan SMA/SMK asal Papua yang memiliki bekal cukup untuk melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi. Ada program lanjutan setelah ADEM bila memenuhi syarat berlanjut ke Program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK).

Pelaksanaan program ADEM bagi siswa asli Papua ini memberi kesempatan yang lebih besar bagi para siswa untuk menyesuaikan diri dan sekaligus menempatkan diri pada derajat akademik yang sama dengan teman-teman lain di luar Papua. Oleh sebab itu, dilakukan langkah antisipasi dini dengan mempersiapkan putra-putri Asli Papua pada jenjang pendidikan menengah untuk melanjutkan pendidikan tingkat SMA/SMK di luar Papua.

Berdasarkan definisi dari UP4B, *Affirmative Action* adalah kebijakan yang diambil dengan tujuan agar kelompok/golongan tertentu (gender ataupun profesi) memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama. Hal ini bertujuan sebagai keberpihakan terhadap Orang Asli Papua. Secara nasional, Tahun 2012 ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua Barat berada di peringkat

29 dan IPM Provinsi Papua menempati urutan 33 dari 33 provinsi di Indonesia. Program keberpihakan bidang pendidikan merupakan amanat pasal 56 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, yang menyatakan bahwa "Setiap penduduk berhak memperoleh pendidikan yang bermutu dengan beban masyarakat serendah-rendahnya".

Tentu saja masih banyak program lain yang bermuara pada keberpihakan kepada daerah 3T. Program-program dari kementerian yang lain selain kemendikbud juga dapat digunakan sebagai acuan. Saat ini, Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) bekerja sama dengan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Barat membuka kesempatan kepada pemuda sarjana untuk membangun desa melalui Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (PSP-3). Pada tahun 2014 ini, Kemenpora RI merekrut 1000 peserta PSP-3. Penempatan peserta PSP-3 dilakukan lintas provinsi di 500 desa, 251 kecamatan, 66 kabupaten.kota pada 33 provinsi.

Program lain yang sangat populer seperti Indonesia Mengajar juga bisa digunakan acuan. Juga Program Indonesia Bangun Desa (IDB), yang tidak hanya bisa diikuti oleh para sarjana, tetapi juga oleh lulusan Diploma 3, yang memenuhi persyaratan tertentu, salah satunya adalah memiliki kanvas bisnis yang telah, sedang, atau yang akan

dijalankan dalam sektor pertanian (pertanian, peternakan, perikanan).

Unesa sejak tahun 2013 juga bekerja sama dengan Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) untuk menyelenggarakan Program Jatim Mengajar. Program ini mengadopsi model SM-3T, mulai dari seleksi, prakondisi, pelaksanaan pengabdian, dan sebagainya. Namun, sesuai namanya, Program Jatim Mengajar hanya mengirimkan para peserta ke wilayah tertinggal di Jawa Timur saja. Selain itu, Program Jatim mengajar juga tidak memberikan reward kepada para peserta untuk menempuh PPG setelah menyelesaikan tugas pengabdiannya. Meski begitu, saat ini sedang diupayakan, agar para alumni peserta Jatim Mengajar dapat mengikuti PPG juga.

Berbagai program tersebut dapat digunakan sebagai acuan bagi Unesa untuk merancang program dan kegiatan sebagai bentuk kepedulian pada daerah 3T. Tentu saja, sebagai LPTK, Unesa lebih memfokuskan perhatiannya pada berbagai persoalan pendidikan, seperti membantu mengatasi kekurangan guru, baik dalam hal jumlah maupun mutunya. Guru-guru yang bertugas di daerah 3T, di samping mendidik dan mencerdaskan anak-anak bangsa, para guru tersebut juga menjadi bagian dari katup pengaman keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mengingat daerah 3T memiliki fungsi pertahanan keamanan, fungsi ekologi, dan fungsi ekonomi.

Unesa juga sangat berpeluang menyelenggarakan berbagai program untuk para putra-putri daerah 3T dengan program khusus. Dengan kondisi dan potensi pendidikan yang sangat berbeda dengan daerah-daerah perkotaan, sangat tidak adil memberlakukan persyaratan dan peraturan yang sama bagi putra-putri daerah 3T untuk bisa lulus masuk PTN, termasuk Unesa. Harus ada kebijakan khusus dan pintu khusus agar mereka juga memiliki kesempatan yang sama dengan para putra-putri daerah dari wilayah-wilayah maju untuk mengenyam pendidikan yang bermutu.

Penutup

Hilangnya Pulau Sipadan dan Ligitan memberi pelajaran berharga bagi kita, betapa pentingnya memelihara pulau-pulau terluar baik yang berpenghuni maupun tidak. Karena begitu luasnya wilayah Indonesia, mengandalkan kekuatan militer saja tidak akan cukup untuk menjaga pulau-pulau tersebut. Butuh komitmen seluruh rakyat Indonesia untuk peduli dan sadar nilai strategis keberadaannya. Meski jauh dari kita, pulau-pulau terluar adalah penanda batas teritorial Nusantara yang menjadi garis depan kedaulatan Indonesia. Daerah 3T memiliki potensi sumberdaya alam yang besar, serta merupakan wilayah yang sangat strategis bagi pertahanan dan keamanan negara.

Unesa sebagai salah satu LPTK sudah seharusnya memiliki kepedulian bagi percepatan pembangunan di daerah 3T, khususnya pembangunan dalam bidang pendidikan. LPTK, khususnya Unesa, memiliki pengalaman panjang dalam program tersebut, dan sampai saat ini pun, program-program yang berpihak pada daerah 3T masih terus dilaksanakan. Hanya saja, program-program tersebut lebih banyak bergantung pada pemerintah, yaitu sebagai LPTK yang ditugasi untuk melaksanakan program perintisan, antara lain PPGT, PPG Kolaboratif, SM-3T dan PPG SM-3T. Ke depan diharapkan, Unesa memiliki inisiatif mandiri untuk merancang program-program serupa.

Dalam rangka mewujudkan maksud tersebut, kerja sama dengan berbagai pihak harus dilakukan. Saat ini Unesa telah memiliki banyak kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta, dan pihak yang lain dalam menyelenggarakan program-program penyiapan guru dan peningkatan kompetensi guru. Program Jatim Mengajar merupakan salah satu bentuk kerja sama dengan pihak swasta, yaitu YDSF. Program pelatihan guru telah dilakukan dengan banyak kabupaten di luar Jawa, termasuk di daerah 3T. Hanya saja, berbagai kegiatan tersebut belum berpayung dalam sebuah program, misalnya dengan nama Program Peduli Daerah 3T atau Unesa untuk Daerah 3T. ■

“

Unesa sebagai salah satu LPTK sudah seharusnya memiliki kepedulian bagi percepatan pembangunan di daerah 3T, khususnya pembangunan dalam bidang pendidikan. LPTK, khususnya Unesa, memiliki pengalaman panjang dalam program tersebut, dan sampai saat ini pun, program-program yang berpihak pada daerah 3T masih terus dilaksanakan. Hanya saja, program-program tersebut lebih banyak bergantung pada pemerintah, yaitu sebagai LPTK yang ditugasi untuk melaksanakan program perintisan, antara lain PPGT, PPG Kolaboratif, SM-3T dan PPG SM-3T. Ke depan diharapkan, Unesa memiliki inisiatif mandiri untuk merancang program-program serupa.

”